TFD IMPF III

Ringkasan Co-chairs

Pekanbaru

5 – 8 Maret 2007

Kesimpulan Gland / Beihai

- IMPFs – tidaklah baik secara alamiah, tidak juga buruk
- Pengaruh eksternal membentuk IMPF's –sering di luar kendali sektor itu.
- Pemahaman konteks yang dibedakan: Sebuah wadah “satu ukuran cocok untuk semua” adalah berlebihan!
- CSR – di luar “tidak merusak” pada model-model usaha yang layak yang jelasnya melaksanakan hal lokal yang baik dan berandil pada pembangunan pedesaan
- Hak tanah dan properti yang lebih jelas hal kritis bagi para masyarakat, smallholder dan industri besar
- Buruh – kisah kompleks – resiko dan peluang – para pendatang bisa diberdayakan. Apa peran proaktif yang bisa dilakukan perusahaan?

Kesimpulan Gland / Beihai II

- Tidak bentuk usaha hitam dan putih yang memuaskan semua pemangku kepentingan. Tiga ring konsentrasi:-
 - Pasokan minimum inti memeriksa praktek terbaik pengambilalihan hak guna tanah.
 - Kontrak bagus dan mitra yang bersedia
 - Pasokan dari agen bebas <<bertumbuh>> yang terberdayakan dan tersedia
 - Gulirkan seiring waktu – membangun mosaik lanskap hutan beragam
- Peranan bagi industri dalam pengembangan kapasitas – guna membantu petani menjadi petani pohon
- Bidang basis umum belum dituntaskan – peraturan; pertanahan; produktivitas; kesatuan ekosistem; keamanan kayu

Tema-tema China & fokus Indonesia

- Sektor swasta sebagai alat pembangunan
- CSR
- Kemitraan perusahaan masyarakat
- Mekanisasi
- Tanah adat & hak guna
- Keragaman hayati & lingkungan
- Skala & pilihan bebas
- Kerangka kerja politis & hukum
- Distribusi keuntungan
- Karyawan & kontrak
- Tanah adat & hak guna; persaingan tanah
- Konversi hutan, penghindaran deforestasi, HCVF sebagai alat
- Laju perubahan

Topik 1

Sektor swasta sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan

- Kerangka kerja politik dan hukum untuk kesetaraan distribusi pendapatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat (peranan pemerintah, perusahaan, peranan masyarakat madani)
 - CSR (siapa yang menentukan? Siapa yang mengaudit? Adanya kelemahan kerangka kerja pemerintah dapatkah perusahaan melakukan lebih baik?)
 - Model pendistribusian lahan di Afrika Selatan
 - Jaring pengaman?
 - Model perizinan industri di Cina (sebelum proses)
 - Kebijakan land reform terbaru di Indonesia
 - Ratifikasi konvensi ECOSOC oleh Indonesia tahun 2005
- Transparansi & akuntabilitas
- Profil resiko
- Distribusi keuntungan
 - Perjanjian kerjasama untuk skema plasma
 - Apakah para petani mempunyai pilihan pada konsep lanskap mosaik?
 - Bentuk karyawan & kontrak
 - Sumber dari dalam vs sumber dari luar bagi para buruh

Catatan untuk Topik 1

- Perusahaan – kontraktor – subkontraktor pengaturan ini berpotensi menciptakan konflik dan “cuci tangan”
- Penguatan untuk pengaturan kontrak
- Program jaring pengaman pemerintah dapat melengkapi CSR perusahaan

Topik 2:

Tanah adat & hak guna

- Kerangka kerja politis & hukum
- Penduduk asli & kepentingan-kepentingan lain
 - Pengakuan hak ulayat
 - Rekonsiliasi politik dan hukum kehutanan atas masyarakat
- Proses alokasi & pengambilan tanah
- Proses resolusi konflik
- Keberlanjutan kehidupan masyarakat
- Laju perubahan

Catatan untuk topik 2

- Resolusi konflik diperlukan atas konflik sosial
- Hasil hutan non kayu diusulkan pada peningkatan hidup masyarakat dan konsep hutan mozaik

Topik 3:

Konversi hutan

- Laju perubahan; kapasitas mill
 - Perluasan yang lebih lanjut → lebih banyak konflik? Lebih banyak masalah lingkungan? (lebih beresiko?)
 - Kebutuhan internasional untuk kertas harus sesuai dengan dampak lokal, pemerintahan dan penegakannya.
 - Tata guna tanah – pilihan, model
 - Peraturan sudah dibuat?
 - Rencana tata guna lahan yang antar sektor pada tingkatan nasional/provinsi/Kabupaten?
- Apakah IMPF melindungi atau menghancurkan hutan alam?
- Dapatkah teknologi mengatasi tantangan lingkungan?
 - Melindungi kepentingan masyarakat?
- Penggunaan HCVF?
 - Keseimbangan karbon & resiko iklim

Catatan untuk topik 3

- Investasi untuk kapasitas pabrik sekitar US 1.500/ton → tekanan untuk kapasitas penuh → tekanan untuk konversi (& penanaman?)
- Keragaman jenis
- Pandangan mendasar antar wilayah (suplai bahan baku ke pabrik dari IMPF/MHT dari negara lain)
- Menggunakan konflik : IMPF baru vs Areal lindung yang ada
- Perkebunan pada daerah gambut yang gundul (di Sumatera Utara)

Pandangan-pandangan atas dialog ini

- Pengusaha
- Beban dari sejarah
- Pengenalan terhadap situasi konflik dan isu-isu lingkungan
- Hormati masyarakat/ keterbukaan dan ingatkan untuk menemukan rekonsiliasi
- Perusahaan memerlukan pertolongan pemerintah
- Perlu untuk membuat protokol untuk pemecahan konflik

Pandangan-pandangan

- Masyarakat:
- IMPF menciptakan banyak konflik sosial (lunturnya kbudaya, hilangnya kehidupan, konflik horishontal, kesenjangan penghasilan) dan dampak lingkungan (Cth: konflik gajah)
- Seruan dari Masyarakat:
- Masyarakat ingin saham atas usaha yang dibangun diatas lahan orang lokal
- Perusahaan/Subkontraktor tidak dapat cuci tangan atas konflik
- Tata guna lahan baru memerlukan konfirmasi legal/yang sah dari masyarakat lokal sebagai tambahan atas perizinan dari pemerintah
- Peraturan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkesinambungan untuk masyarakat

Pandangan-pandangan

- Pemerintah:
- Selamat pada proses dialog
- Pada kebijakan pembangunan IMPF:
 - - Akan membawa dan seluruh isu-isu ke Menhut dan mempelajari solusi-solusi yang disarankan
- Tertarik untuk menjamin masukan bahan baku ke pabrik pulp dari IMPF mulai beralih dari hutan alam
- HTR merupakan hal yang baru

Pandangan-pandangan

- Serikat Buruh:
- IMPF perlu untuk menjamin hak-hak buruh (gaji, keamanan akan lahan, kondisi pekerja, bargain yang kolektif)
- Sektor swasta untuk mengembangkan BMP dan menjamin penghapusan pelanggaran HAM
- Menjamin partner lain cth. Masyarakat/kelompok2
- Dukung masyarakat dan orang lokal atas lahan ulayat mereka

Pandangan-pandangan

- LSM lingkungan
- Pengenalan atas kepentingan sektor swasta dan pemerintah untuk membangun industri pulp dan kertas dan IMPF
- Target kelestarian pada tahun 2009 harus tercapai
- Pengenalan atas hak-hak masyarakat di BMPnya perusahaan
- Isu2 lingkungan yang mendesak untuk diatasi (tidak banyak waktu lagi tersisa)
- Seluruh penilaian yang diperlukan harus dilakukan sebelum alokasi dari tata guna lahan dan keputusan
- Menyerukan kepada Menhut untuk mengatasi isu2 tersebut kedepannya.